

BAB 3 GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

3.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

Sebagai sebuah organisasi, Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marga) telah merumuskan tujuan dan sasaran organisasi untuk mendukung keberhasilan perjalanan sebuah organisasi dengan merumuskan visi atau cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat hidup dan antisipatif dalam menghadapi perubahan serta merumuskan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun visi dan misi Ditjen Bina Marga adalah:

Visi :

“Tersedianya jaringan jalan yang handal”. Direktorat Jenderal Bina Marga mampu menyediakan jaringan jalan yang handal, berkualitas, terpercaya, bermanfaat dan berkelanjutan serta mampu mendukung tercapainya Indonesia yang Aman, Adil dan Demokratis serta Lebih Sejahtera melalui pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengusahaan dan pengawasan yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi:

Untuk melaksanakan visi tersebut, telah ditetapkan misi Ditjen Bina Marga sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan jalan yang efektif, efisien serta berkelanjutan.
- 2) Mengembangkan SDM yang professional dan tanggap untuk mendukung penyelenggaraan jaringan jalan.
- 3) Mengembangkan teknologi yang tepat guna dan kompetitif serta meningkatkan keandalan mutu infrastruktur jalan.
- 4) Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaringan jalan.

3.2 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditjen Bina Marga

3.2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa tugas Departemen Pekerjaan Umum adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut, dalam lingkup departemen, Menteri Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan No.01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Marga mempunyai tugas *“Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Bina Marga”*.

3.2.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Ditjen Bina Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknik di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga.
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan jalan propinsi/ kabupaten/ kota
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan jalan propinsi/ kabupaten/ kota
- 5) Pengembangan system pembiayaan dan pola investasi bidang jalan.
- 6) Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang jalan.
- 7) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, wewenang Ditjen Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan, meliputi:

- Penyelenggaraan jalan secara umum
- Penyelenggaraan jalan nasional

- a. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan (TURBINBANGWAS)
- b. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Penyusunan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang jalan;
 - 2) penyusunan pedoman perijinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas provinsi;
 - 3) penetapan kebijakan dan pembinaan pengembangan bidang konstruksi nasional;
 - 4) pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional atau prasarana jalan lintas provinsi dan / atau yang strategis nasional sesuai dengan kesepakatan Daerah

3.2.3. Struktur Organisasi

Agar berjalannya fungsi pemerintahan dengan baik maka disusunlah Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden R.I. Nomor: 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

Sebagai manifestasi dari Perpres tersebut maka disusunlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.286/PRT/M tanggal 15 Juni 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum dimana Ditjen Bina Marga terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan anggaran operasional, serta fasilitasi penyajian informasi publik di bidang jalan dan jembatan
 - b. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan milik negara
 - d. Analisis dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan di bidang jalan dan jembatan
2. Direktorat Bina Program : mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan penyusunan program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang jalan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan;
 - b. Penyusunan rencana umum jaringan jalan;
 - c. Penyusunan program dan anggaran serta ketatalaksanaan pinjaman luar negeri;
 - d. Evaluasi kinerja, fungsi dan manfaat serta pelaksanaan program
 - e. Pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan serta pengelolaan data informasi dan leger jalan;
 - f. Penyediaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten dan desa/kota; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
3. Direktorat Bina Teknik : mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan jalan dan penyusunan standar dan pedoman termasuk analisa lingkungan di bidang jalan
- Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Bina Teknik menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan teknik jalan;
 - b. Perencanaan teknik jembatan;

- c. Penyusunan rencana, pemanfaatan dan pemeliharaan bahan dan peralatan
 - d. Penyusunan standar dan pedoman bidang jalan dan jembatan;
 - e. Pembinaan pengelolaan dan analisa lingkungan jalan & jembatan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
4. Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota (JBHJK) : mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan jalan bebas hambatan dan sebagian jalan kota metropolitan serta pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi bidang jalan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan dan program bebas hambatan dan jalan tol;
 - b. Pengadaan lahan jalan tol dan sebagian jalan kota metropolitan;
 - c. Penyusunan kebijakan investasi jalan bebas hambatan dan jalan tol;
 - d. Pemantauan dan evaluasi jalan bebas hambatan dan jalan tol;
 - e. Perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan jalan kota metropolitan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
5. Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan termasuk pengawasan teknis, review desain dan bimbingan teknis jalan dan jembatan di propinsi-propinsi wilayah Sumatera dan Jawa.
- Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan usulan program pembangunan jalan dan jembatan nasional;
 - b. Pelaksanaan pembangunan jalan nasional;
 - c. Pengawasan teknis, review desain dan bimbingan teknis;
 - d. Bimbingan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

6. Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Timur : mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan termasuk pengawasan teknis, review desain dan bimbingan teknis jalan dan jembatan di propinsi-propinsi di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

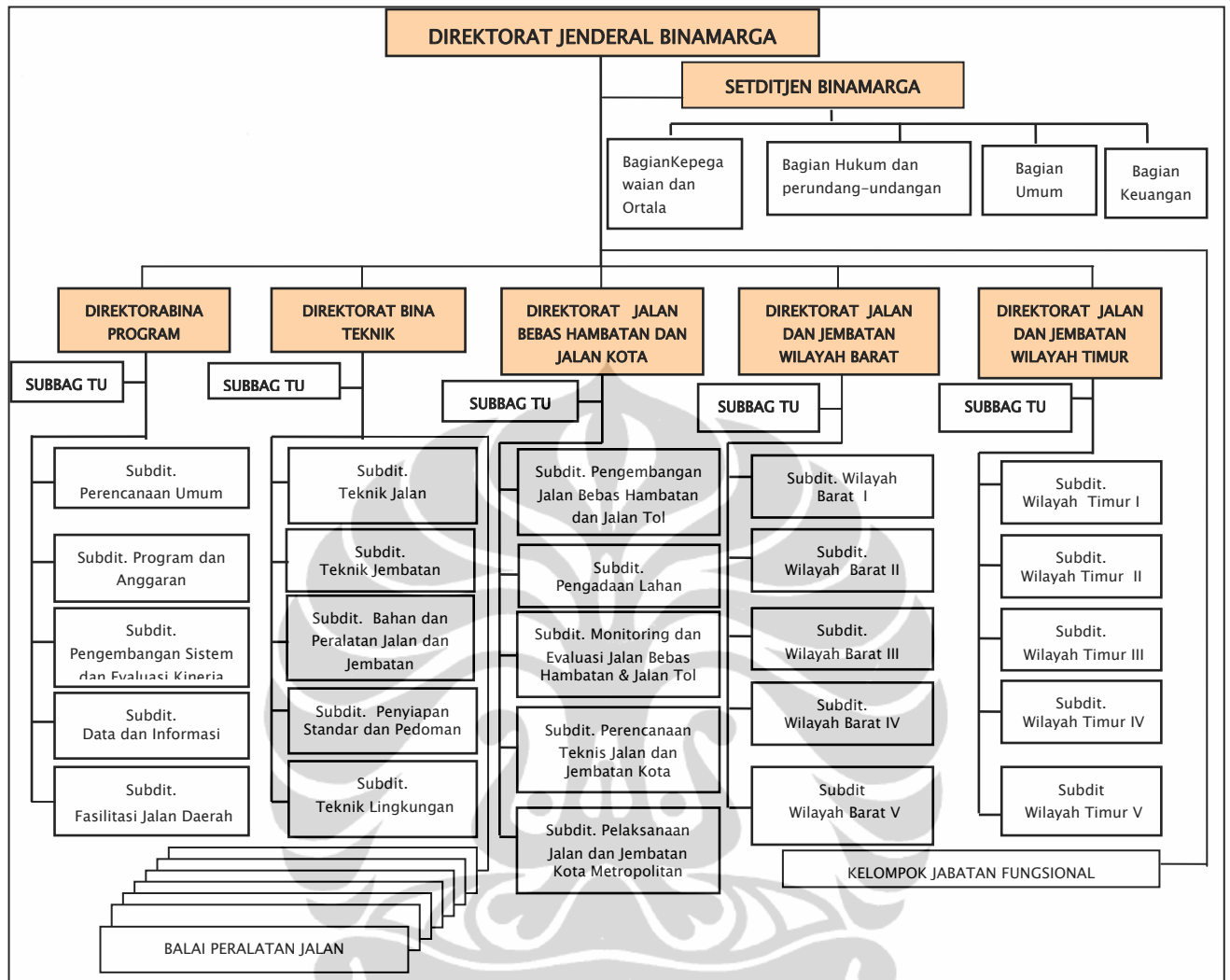
Untuk melaksanakan tugasnya, Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program pembangunan jalan dan jembatan nasional;
- b. Pelaksanaan pembangunan jalan nasional;
- c. Pengawasan teknik, review desain dan bimbingan teknis;
- d. Bimbingan teknik pelaksanaan jalan dan jembatan nasional, propinsi, kabupaten dan desa/kota.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dengan adanya Balai Pelaksanaan Jalan telah terjadinya perubahan struktur organisasi di Ditjen Bina Marga yang didasari oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di lingkungan Ditjen. Bina Marga sehingga, jumlah Satminkal dan Unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga pada tahun 2009, terdiri dari:

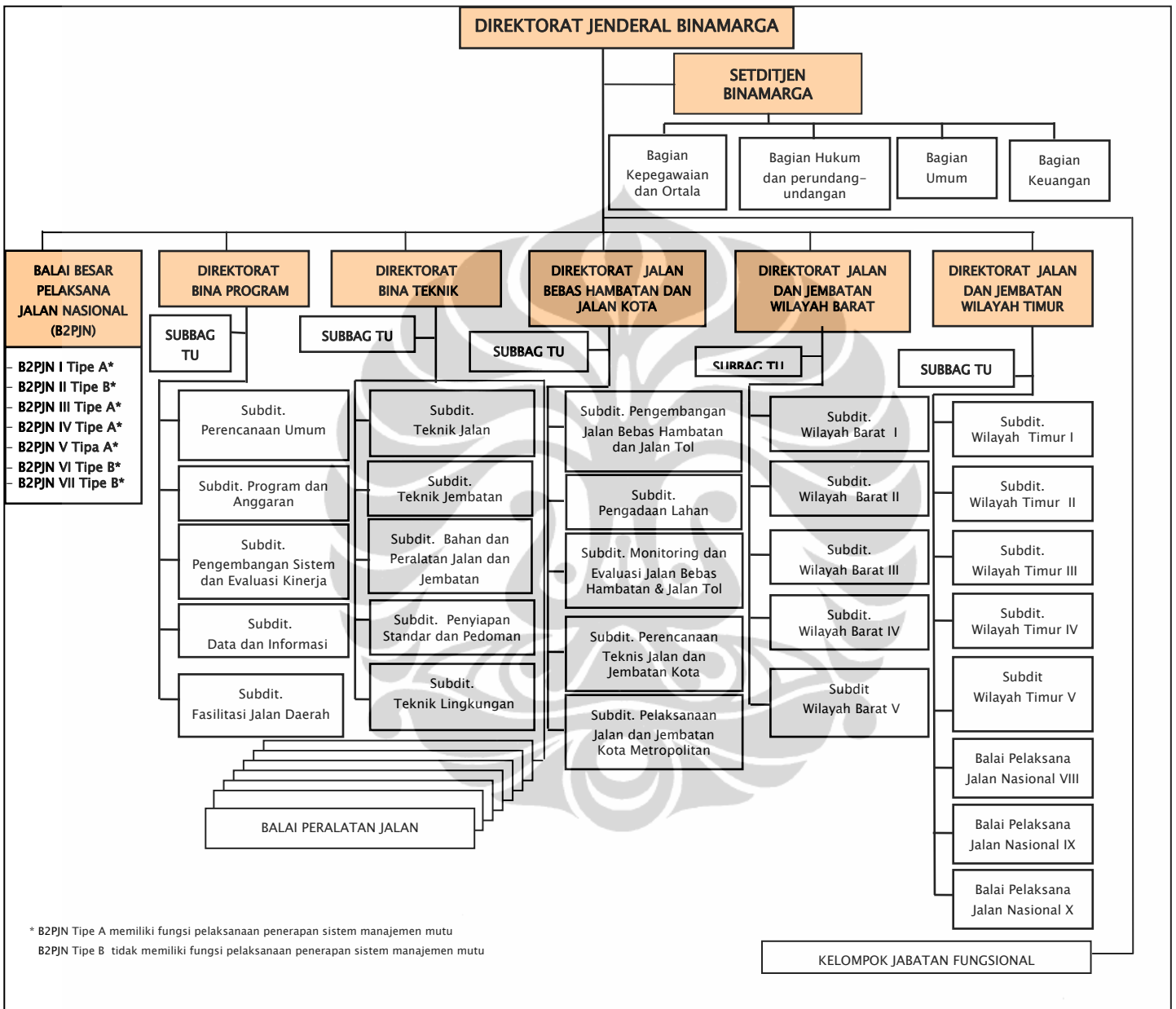
- a) Satminkal Eselon I : 1 unit
- b) Unit Kerja Eselon II : 14 unit (6 Direktorat dan 8 Balai)
- c) Unit Kerja Eselon II I : 71 unit
- d) Unit Kerja Eselon IV : 150 unit.

Struktur organisasi Ditjen Bina Marga sebelum adanya Balai dapat dilihat pada Gambar 3-1, dan struktur organisasi Ditjen Bina Marga setelah ada Balai disajikan pada Gambar 3-2.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Sebelum Terbentuknya Balai Pelaksana Jalan Nasional

(Sumber : LAKIP Ditjen Bina Marga tahun 2009)



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Sesudah Terbentuknya Balai Pelaksana Jalan Nasional

(Sumber: Lakip Ditjen Bina Marga tahun 2009)

3.3 Sasaran dan Program

3.3.1 Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuannya dalam Renstra telah ditetapkan 5 (lima) sasaran yang akan dicapai serta arah kebijakan Ditjen Bina Marga untuk mewujudkan sasaran tersebut. Sasaran tersebut kemudian dituang dalam bentuk kegiatan-kegiatan selama 5 (lima) tahun yang kemudian dalam pelaksanaan tiap tahunnya dilaksanakan melalui DIPA dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja untuk menetapkan target.

5 (lima) sasaran Ditjen Bina Marga dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan, visi dan misi dapat dilihat pada Tabel 3.1

Pada LAKIP Ditjen Bina Marga tahun 2009 ditunjukkan bahwa semua sasaran dapat dicapai dengan hasil baik dengan skor rata-rata pencapaian target 80% s.d 100%. Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen Bina Marga tahun 2009 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.1
Sasaran dan Program Penyelenggaraan Jalan dalam mendukung Tujuan, Visi dan Misi Dijen Bina Marga

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Ter sedianya jaringan jalan yang handal	a. Melaksanakan penyelenggaraan jalan yang efektif, efisien serta berkelanjutan.	a. Mengurangi tingkat kemiskinan dan mengembangkan berbagai wilayah serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah melalui pendekatan penataan ruang.	I. . Terdukungnya wilayah dengan pembangunan jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional bukan tol dan jembatan di kawasan perbatasan 1.500 km II. Terdukungnya wilayah dengan pembangunan jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional bukan tol dan jembatan di daerah rawan bencana serta akibat kerusuhan sosial 649 km IV. Terdukungnya wilayah dengan pembangunan jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional bukan tol dan jembatan di dan daerah terisolir dan pulau-pulau kecil terpencil 2.014 km	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan 2. .Peningkatan/Pembangunan jalan dan jembatan
	c. Mengembangkan teknologi yang tepat guna dan kompetitif serta meningkatkan keandalan mutu infrastruktur jalan.	b. Meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.	I. Meningkatnya kemampuan pelayanan internal wilayah perkotaan dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan V. Meningkatnya kecepatan maupun kenyamanan mobilitas manusia, barang, dan jasa seiring dengan meningkatnya daya dukung kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan serta aksesibilitas wilayah.	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Peningkatan/Pembangunan jalan dan jembatan
	b. Mengembangkan SDM yang profesional dan tanggap untuk mendukung penyelenggaraan jaringan jalan. d. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaringan jalan.	c. Meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pembangunan Pekerjaan Umum.	VII. Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pekerjaan umum melalui penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .	1. Peningkatan/Pembangunan jalan dan jembatan 2. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan

(Sumber: RENSTRA Ditjen Bina Marga tahun 2005-2009)

Tabel 3-2
Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen Bina Marga pada LAKIP
Ditjen Bina Marga tahun 2009

INSTANSI : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Formulir PPS

No	SASARAN			REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)			
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100%	7
1.	<p>Meningkatnya kemampuan pelayanan internal wilayah perkotaan dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan</p> <p>Sub sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya kecepatan tempuh rata-rata di Kota Metro 30 km/jam dan di kota Non Metro 35 km/jam melalui pemeliharaan 1.200,78 km jalan metro dan 523,45 km jalan kota Non-Metro - Meningkatnya 5,88 % mobilitas orang, barang dan jasa di wilayah perkotaan melalui pembangunan 7 km jalan metro; 61,15 km jalan kota; 232,10 m jembatan. 	<p>Tercapainya kecepatan tempuh rata-rata :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metro • Non-metro <p>Meningkatnya mobilitas orang, barang dan jasa di wilayah perkotaan</p>	<p>30 km/jam</p> <p>35 km/jam</p> <p>100 %</p>	<p>29.35 km/jam</p> <p>34.56 km/jam</p> <p>89 %</p>	<p>97.83</p> <p>98.74</p> <p>89</p>	
2.	<p>Terdukungnya wilayah dengan pembangunan jaringan Jalan Nasional dan Jalan Strategis Nasional bukan tol di kawasan perbatasan dan daerah terisolasi dan pulau-pulau kecil terpencil</p> <p>Sub sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdukungnya 5,76 % kawasan perbatasan melalui pembangunan jalan dan jembatan - Terdukungnya 100 % daerah rawan bencana melalui pembangunan jalan dan jembatan - Terdukungnya 3,43 % daerah terisolir dan pulau kecil terpencil melalui pembangunan jalan sepanjang 69 km dan jembatan sepanjang 190 meter 	<p>Terdukungnya kawasan perbatasan dengan jaringan jalan dan jembatan</p> <p>Berkurangnya 100% hambatan mobilitas orang dan barang</p> <p>Meningkatnya mobilitas Terbukanya aksesibilitas daerah terisolasi dan pulau kecil terpencil</p>	<p>100%</p> <p>100 %</p> <p>100%</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	

Tabel 3-2
Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen Bina Marga pada LAKIP
Ditjen Bina Marga tahun 2009

INSTANSI : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Formulir PPS

No	SASARAN			REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)			
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100%	7
3.	<p>Meningkatnya kecepatan maupun kenyamanan mobilitas manusia, barang dan jasa seiring dengan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan; serta aksesibilitas wilayah.</p> <p>Sub sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya 8 % aksesibilitas orang, barang dan jasa di kawasan sedang berkembang melalui pembangunan jalan sepanjang 172,40 km dan jembatan sepanjang 253 meter di kawasan sedang berkembang - Meningkatnya 19,57 % mobilitas orang, barang dan jasa dengan kecepatan tempuh rata-rata 46 km/jam melalui pembangunan jalan 132 km dan pembangunan jembatan 778 meter di kawasan telah berkembang - Meningkatnya kecepatan maupun kenyamanan mobilitas manusia, barang, jasa melalui pemeliharaan jalan sepanjang 29.444,77 Km dan jembatan 63.110 m pada tingkat kemantapan 86% dan kec.tempuh 46 Km/Jam - Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan sepanjang 2.743,69 km dan jembatan 6.574,9 m dengan tingkat kemantapan 86% - Meningkatnya 34,88% kelancaran pelaksanaan tugas operasional melalui perancangan dan pengawasan fungsi jalan sepanjang 8.875,73 km dan jembatan 26.491,20 m, serta pembebasan lahan 2.177.488 M2 	<p>Meningkatnya aksesibilitas orang, barang dan jasa di kawasan sedang berkembang</p> <p>Meningkatnya mobilitas orang, barang dan jasa di kawasan telah berkembang dengan Kecepatan tempuh rata-rata</p> <p>Meningkatnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecepatan tempuh rata-rata • kondisi mantap <p>Meningkatnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecepatan tempuh rata-rata • kondisi mantap • Lajur Km <p>Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional Direktorat Jenderal Bina Marga.</p>	<p>100%</p> <p>100 % 46 km/jam</p> <p>46 km/jam 86 %</p> <p>46 km/jam 86 % 84.985 Lajur Km</p> <p>100 %</p>	<p>100 %</p> <p>77 % 45.52 km/jam</p> <p>45.52 km/jam 86.02 %</p> <p>45.52 km/jam 86.02 % 84.646 Lajur Km</p> <p>92 %</p>	<p>100</p> <p>77 98.95</p> <p>98.95 100</p> <p>98.95 100 99.60</p> <p>92</p>	

Tabel 3-2
Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen Bina Marga pada LAKIP
Ditjen Bina Marga tahun 2009

Sambungan Tabel 3-2

INSTANSI : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Formulir PPS

No	SASARAN			REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)			
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100%	7
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan dan profesionalisme penyelenggaraan pekerjaan umum Sub sasaran: - Meningkatnya kapasitas SDM penunjang tugas pimpinan melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis bidang jalan dan jembatan	Terdukungnya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan/ pengendalian penyelenggaraan jalan dan jembatan	100%	82%	82	
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pekerjaan umum melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Sub sasaran: - Tersedianya 100% NSPM penyelenggaraan jalan dan jembatan melalui penyiapan standar dan pedoman teknik jalan dan jembatan 37 Judul - Terdistribusikannya ke beberapa lokasi bahan jalan dan jembatan untuk mendorong pembangunan daerah melalui fasilitasi asbuton 14.000 ton, jembatan rangka baja 1.545 m, kawat bronjong 10.000 unit. - Meningkatkan 100% kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan ke bina margaan melalui pengembangan sistem dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan	Tersedianya 100% NSPM bidang jalan dan jembatan	100%	100 %	100	
		Terdistribusikannya bahan jalan dan jembatan	100%	86 %	86	
		Terselenggaranya 100% evaluasi kinerja dan perencanaan program anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan tahun 2009	100 %	100 %	100	

(Sumber: LAKIP Ditjen Bina Marga Tahun 2009)

3.3.2 Program

Berdasarkan Renstra Departemen Pekerjaan Umum 2005-2009, bahwa untuk mewujudkan sasaran dalam Renstra Ditjen Bina Marga tahun 2005-2009 didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu: (1) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; (2) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan; (3) program penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dari masing-masing program tersebut mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan jalan nasional di wilayah perkotaan (Metro dan non Metro)
 - b. Pemeliharaan jembatan ruas jalan nasional di perkotaan
 - c. Pemeliharaan jalan nasional akibat bencana alam (tanggap darurat)
 - d. Pemeliharaan jalan nasional ruas jalan nasional (non perkotaan)
 - e. Pemeliharaan jembatan ruas jalan nasional (non perkotaan)
2. Program Peningkatan / Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan jalan nasional di wilayah perkotaan (Metro dan non Metro)
 - b. Pembangunan jembatan ruas jalan nasional dan FO (jembatan layang) di wilayah perkotaan (Metro dan Non Metro)
 - c. Pembangunan jalan nasional di kawasan perbatasan
 - d. Pembangunan jembatan ruas jalan nasional di kawasan perbatasan
 - e. Pembangunan jalan nasional di kawasan rawan bencana
 - f. Pembangunan jembatan ruas jalan nasional di kawasan rawan bencana
 - g. Pembangunan jalan nasional di daerah terisolir dan pulau kecil terpencil
 - h. Pembangunan jembatan ruas jalan nasional di daerah terisolir dan pulau kecil terpencil
 - i. Pembangunan jalan nasional di kawasan sedang berkembang

- j. Pembangunan jembatan ruas jalan nasional di kawasan sedang berkembang
 - k. Pembangunan jalan nasional di kawasan telah berkembang
 - l. Pembangunan jembatan ruas jalan nasional di kawasan telah berkembang
 - m. Peningkatan jalan nasional
 - n. Penggantian jembatan ruas jalan nasional
 - o. Pembangunan 1 buah fly over (jalan layang) di P. Jawa
 - p. Perencanaan dan pengawasan teknik jalan dan teknik jembatan
 - q. Pembangunan jalan tol
3. Program penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan
- a. Pembinaan pelaksanaan teknis jalan dan jembatan

3.4 Data Pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga

Berdasarkan data di Bagian Kepegawaian Ditjen Bina Marga periode tahun 2010, komposisi Pegawai Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3-3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	912	79,51
Perempuan	235	20,49
Total	1147	100 %

(Sumber: Bagian Kepegawaian, Ditjen Bina Marga)

Adapun distribusi/penyebaran pegawai pada masing-masing unit kerja/Direktorat dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3-4
Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	Jumlah
Setditjen	159
Bina Program	191
Bina Teknik	382
JBHJK	203
Wilayah Barat	113
Wilayah Timur	99
Total	1147

(Sumber: Bagian Kepegawaian, Ditjen Bina Marga)



BAB 4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2010) diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan cara ilmiah adalah kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Sesuai dengan pengertian tersebut, dibawah ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum dengan pendekatan *balanced scorecard*.

4.1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

1) Data primer

Data primer digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

2) Data sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan keuangan berupa penelusuran literatur yang bersumber dari dokumen milik Ditjen Bina Marga seperti Rencana Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK), laporan realisasi keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut di atas, penulis menggunakan dua (2) teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2010), yaitu:

1) Wawancara

Dalam teknik wawancara, penulis melakukan wawancara tidak terstruktur dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis tetapi sifatnya mendalam langsung kepada subyek penelitian. Hasil wawancara ini digunakan untuk mendukung peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Ditjen Bina Marga.

Wawancara dilakukan kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan pengukuran kinerja Ditjen Bina Marga, misalnya wawancara dengan sub direktorat evaluasi kinerja untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kinerja Ditjen Bina Marga.

2) Kuesioner (angket)

Penulis mendistribusikan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan tertutup (yang sudah ditentukan jawabannya) yang akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat, dan juga memudahkan penulis dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul.

4.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan di ambil kesimpulan. Dalam penelitian ini subyeknya adalah seluruh karyawan Ditjen Bina Marga Pusat dan mitra kerja (penyedia jasa) yang turut serta dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di Ditjen Bina Marga pada tahun 2007-2009. Singarimbun dan Effendi (1995) menyatakan ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam penelitian, yaitu:

1. Derajat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi.
2. Presisi (ketelitian) yang dikehendaki oleh peneliti, makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, makin besar sampel yang diambil.
3. Rencana analisis.
4. Tenaga, biaya dan waktu

Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi maka ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

(Sumber: Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif)

Dimana: n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d^2 = tingkat kesalahan/ presisi

1 = konstanta

Perhitungan jumlah sampel untuk masing-masing perspektif *balanced scorecard* tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif pelanggan

Untuk variabel pelanggan, pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, sampel sengaja dipilih karena memiliki ciri-ciri khusus (Irawan Prasetya, 2006). Pada variabel ini, pelanggan Ditjen Bina Marga yang dipilih sebagai sampel adalah mitra kerja yang menjadi pemenang dan terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Ditjen Bina Marga Pusat pada tahun 2008 dan 2009, yaitu sebanyak 51 mitra kerja/ konsultan.

2. Perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan/pembelajaran

Untuk variabel proses bisnis internal serta variabel pertumbuhan dan pembelajaran, populasinya adalah pegawai Ditjen Bina Marga Pusat. Berdasarkan data dari sub bagian kepegawaian jumlah pegawai Ditjen Bina Marga pusat tahun 2010 sebanyak 1147 orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4-1 dibawah ini:

Tabel 4-1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
S.3	9
S.2	182
S.1	302
S.0	101
SLTA	416
SLTP	74
SD	63
Total	1147

(Sumber: Sub bagian kepegawaian, Ditjen Bina Marga)

Dengan menggunakan rumus *Slovin* pada tingkat kesalahan sebesar (5%) didapat jumlah sampel sebesar:

$$n = \frac{1147}{1 + 1147 (0,05)^2} = 296,57. \text{ Dibulatkan } 300 \text{ sampel}$$

Dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan latar belakang pendidikan secara proporsional, maksudnya agar sampel yang terpilih betul-betul dapat mewakili populasi yang ada maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling* dikarenakan populasi pegawai Ditjen Bina Marga yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2010). Untuk distribusi sampelnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2, di bawah ini:

Tabel 4.2
Distribusi Sampel Pegawai Ditjen Bina Marga
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	PORSI	JUMLAH SAMPEL (orang)	PEMBULATAN (orang)
1	S.3	0,78%	2,34	2
2	S.2	15,87%	47,60	48
3	S.1	26,33%	78,99	79
4	S.0	8,81%	26,42	26
5	SLTA	36,27%	108,81	109
6	SLTP	6,45%	19,35	20
7	SD	5,49%	16,49	16
Jumlah		100%	300	300

(Sumber: data penelitian diolah)

4.3. Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian

Skala pengukuran adalah merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sedangkan alat ukur yang digunakan dalam penelitian tersebut dinamakan instrumen penelitian (Sugiyono, 2010).

Pada penelitian ini penulis menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2010) yang dimaksud dengan *skala likert* adalah metode untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap fenomena sosial. Keunggulan format *skala Likert* tercermin dari keragaman skor sebagai akibat penggunaan skala.

Untuk skala *Likert*, pada awalnya skor tertinggi tiap butir adalah 5 dan terendah 1. Dalam pengukuran sering terjadi kecenderungan responden memilih jawaban pada kategori 3 (cukup/netral) untuk skala *likert*. Untuk menghindari hal tersebut skala *likert* dimodifikasi dengan hanya menggunakan 4 (empat) pilihan, agar jelas sikap atau minat responden.

Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan penulis secara umum adalah kuesioner, dimana:

1. Perspektif Pelanggan dengan indikator tingkat kepuasan pelanggan.
2. Perspektif proses bisnis internal dengan indikator:
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Proses
3. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan indikator:
 - a. Tingkat kepuasan pegawai
 - b. Tingkat kemampuan pegawai dalam berkomitmen pada organisasi
 - c. Tingkat motivasi dan pemberdayaan pegawai

Sedangkan untuk perspektif keuangan menggunakan data sekunder yang ada di Ditjen Bina Marga dengan melihat: tingkat penyerapan anggaran pada anggaran tahun 2009.

Di bawah ini penjelasan masing-masing skala pengukuran dimaksud:

1. Skala pengukuran kinerja keuangan

Skala penyerapan anggaran dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditentukan sesuai dengan pedoman LAKIP-LAN 1999 sebagai berikut:

 1. < 55% = kurang baik
 2. 55% - 70% = sedang
 3. 70% - 85% = baik
 4. 85%-100% = sangat baik
2. Skala pengukuran kuesioner

Pengukuran kuesioner untuk perspektif pelanggan, bisnis internal dan pertumbuhan/pembelajaran menggunakan skala *likert* dengan empat

tingkat penilaian yaitu: SS/P (sangat setuju/puas) nilai 4; S/P (setuju/puas) nilai 3; TS/P (tidak setuju/puas) nilai 2 dan STP/S (sangat tidak puas/setuju) nilai 1.

Untuk menganalisis data dari hasil jawaban responden melalui kuesioner yang telah diisi, maka sebagai dasar untuk menentukan kriteria nilai jawaban responden harus ditentukan terlebih dahulu interval kelas nilai jawaban responden. Dalam hubungan ini banyaknya kelas ditentukan sebanyak 3 kelas dimana nilai tertinggi untuk masing-masing pernyataan adalah 4 dan nilai terendah adalah 1. Dengan demikian, interval kelas nilai jawaban untuk masing-masing pengukuran dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Munir (2008) sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Jarak (rentang)}}{\text{Jumlah kelas}}$$

$$\begin{aligned} \text{Dimana: rentang} &= \text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah} \\ &= 4 - 1 = 3 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus di atas, maka interval kelas dari nilai jawaban responden adalah:

$$\text{Interval kelas} = \frac{4 - 1}{3} = 1$$

Dengan menggunakan skala *likert* dengan data interval 1-4 untuk menunjukkan tingkat kepuasan responden yang diteliti, maka skala pengukurannya adalah seperti dalam tabel 4-3 berikut:

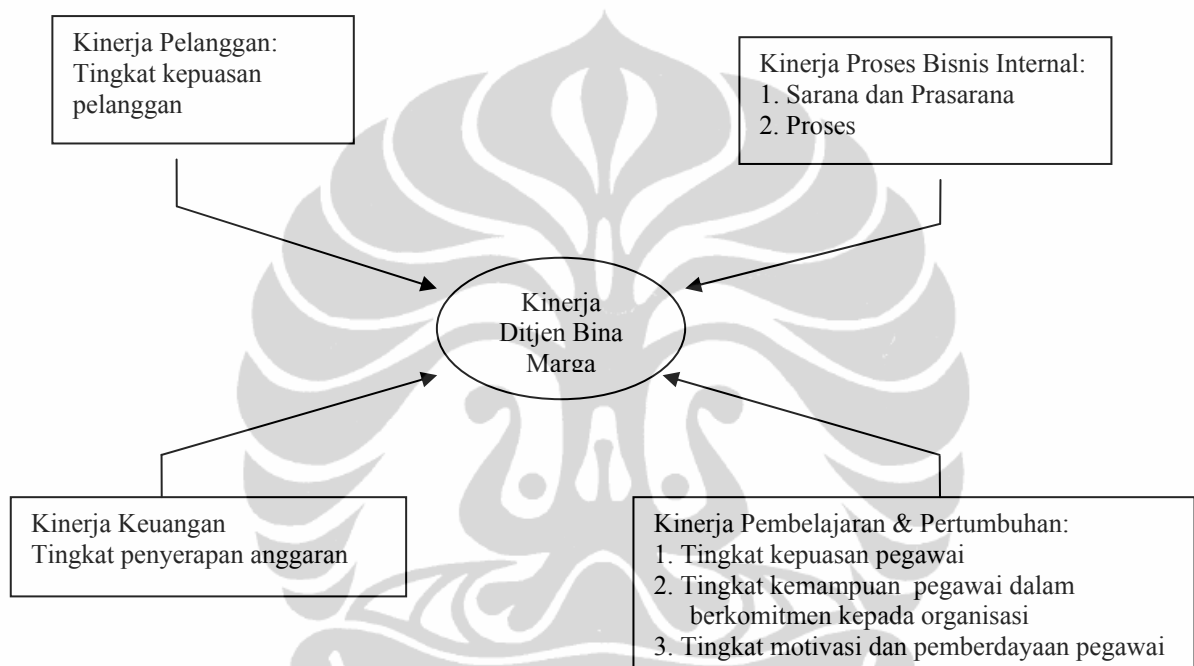
Tabel 4.3. Skala Pengukuran Kuesioner

SKALA	NILAI	KATEGORI
3,1 – 4	4	Sangat Puas/Baik
2,1 – 3	3	Puas/Baik
1,1 – 2	2	Tidak Puas/Baik
1	1	Sangat Tidak Puas/Baik

(Sumber: Hasil Penelitian Penulis)

4.4. Model Analisis Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Ditjen Bina Marga dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* dipengaruhi oleh 4 (empat) kinerja, yaitu kinerja keuangan, kinerja pelanggan, kinerja proses bisnis internal dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat aspek kinerja ini sangat mempengaruhi tingkat kinerja Ditjen Bina Marga. Gambar 4-1 di bawah ini menggambarkan model analisis pengukuran kinerja Ditjen Bina Marga.



Gambar 4-1
Model Analisis Pengukuran Kinerja Ditjen Bina Marga

(Sumber: Diadopsi dari Ruslinda Dwi Wahyuni, Analisis Kinerja Ditjen HKI dengan pendekatan *Balanced Scorecard*, Tesis, Pengkajian Ketahanan Nasional, Pascasarjana UI, Jakarta, 2008: hal 12) dengan penyesuaian

4.5. Analisis Data Penelitian

Metode analisis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yang digunakan dalam menguraikan aspek-aspek secara tabel yang berkaitan dengan variabel penelitian yang meliputi aspek keuangan, pelanggan, bisnis internal dan pertumbuhan/pembelajaran. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap data-data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Analisis yang dilakukan meliputi:

1. Kinerja keuangan

Analisis terhadap kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan antara dana yang terserap dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk satu tahun anggaran yaitu anggaran tahun 2009. Analisisnya dilakukan terhadap dokumen-dokumen/laporan realisasi keuangan.

2. Kinerja pelanggan

Pengukuran terhadap kinerja pelanggan menggunakan indikator tingkat kepuasan pelanggan dimana penulis menyebarkan kuesioner kepada 51 mitra kerja/konsultan dengan kriteria perusahaan yang turut serta dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di Ditjen Bina Marga selama kurun waktu tahun 2007-2008.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, peneliti menggunakan teori *service quality* dari Valerie Zeithaml. Berdasarkan teori ini ada lima variabel *Servqual* yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Wujud fisik (*tangibles*), variabel ini meliputi:
 - Kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruangan
 - Penataan di dalam dan di luar ruangan
- b. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan variabel ini meliputi :
 - Rantai birokrasi administrasi
 - Kepercayaan terhadap ketepatan pelayanan
 - Kesesuaian pelayanan yang diberikan
- c. Daya tanggap (*responsiveness*), variabel ini meliputi:
 - Prosedur penerimaan berkas
 - Pelayanan penerimaan kelengkapan berkas
 - Pelayanan waktu pemrosesan berkas
- d. Jaminan (*assurance*), variabel ini meliputi:
 - Informasi yang mampu diberikan
 - Pencegahan pengulangan kelengkapan dokumen
 - Ketrampilan pegawai
 - Pelayanan yang sopan dan ramah

e. Empati (*emphaty*), variabel ini meliputi:

- Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan masalah
- Perhatian terhadap keluhan mitra kerja

Selanjutnya peneliti membuat daftar pernyataan yang berhubungan dengan lima variabel *Servqual* tadi. Untuk memudahkan pengolahan data, jawaban responden dari kelima *servqual* di atas akan dikuantitatifkan dengan dilakukan perhitungan nilai rata-rata perspektif kepuasan pelanggan.

Dengan menggunakan skala *likert* maka nilai rata-rata tersebut akan mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan Ditjen Bina Marga.

3. Kinerja Bisnis Internal

Untuk menilai kinerja perspektif bisnis internal penulis menyebarkan kuesioner pada 300 orang pegawai Ditjen Bina Marga yang didasarkan pada tingkat pendidikan. Kuesioner tersebut terdiri dari dua variabel dimana masing-masing variabel berisi beberapa pernyataan yang menggambarkan makna dari perspektif bisnis internal, sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana

Merupakan variabel yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Ditjen Bina Marga dalam mendukung kegiatan internal.

b. Proses

Merupakan variabel yang memperhatikan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan terkait dengan target dan waktu, kemampuan mengatasi hambatan, adanya arahan dan bekerja sesuai dengan SOP.

Berdasarkan kuesioner tersebut di atas, maka jawaban yang diberikan responden akan dikuantitatifkan untuk mencari nilai rata-rata pada masing-masing indikator. Dari nilai rata-rata tersebut dengan menggunakan skala *likert* maka dapat diinprestasikan kinerja Ditjen Bina Marga dari perspektif proses bisnis internal.

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Subyek penyebaran kuesioner dalam perspektif ini adalah sama dengan responden yang sudah ditentukan pada perspektif bisnis internal yaitu sebanyak 300 orang pegawai Ditjen Bina Marga yang jumlah penyebaran kuesionernya didasarkan pada tingkat pendidikan responden. Perspektif ini terdiri dari 3 (tiga) variabel yang berisikan beberapa pernyataan untuk menilai perspektif ini yaitu:

a. Tingkat kepuasan pegawai

Untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai dibuat pernyataan yang isinya meliputi masalah kompensasi, supervisi, bekerja sendiri, kerja sama dengan tim, beban kerja.

b. Tingkat kemampuan pegawai dalam berkomitmen terhadap organisasi

Dalam mengukur tingkat kemampuan pegawai dalam berkomitmen terhadap organisasi diajukan pernyataan menggambarkan sejauh mana keterikatan, keterlibatan dan sikap tanggung jawab seorang karyawan terhadap organisasi. Selain itu diajukan 2 (dua) buah pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman visi dan misi organisasi.

c. Tingkat motivasi dan pemberdayaan pegawai

Dalam mengukur tingkat motivasi dan pemberdayaan pegawai diajukan pernyataan yang secara umum berkaitan dengan dua hal yaitu motivasi dan kesempatan untuk berprestasi dan seorang.

Berdasarkan kuesioner tersebut di atas, maka jawaban yang diberikan responden akan dikuantitatifkan untuk mencari nilai rata-rata pada masing-masing indikator. Dari nilai rata-rata tersebut dengan menggunakan skala *likert* maka dapat diinterpretasikan kinerja Ditjen Bina Marga dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran

5. Nilai Kinerja Akhir *Balanced Scorecard*

Setelah mendapati semua nilai kinerja masing-masing perspektif yang ada dalam *balanced scorecard*, maka penulis akan melakukan penilaian kinerja Ditjen Bina Marga secara keseluruhan dengan cara

mengalikan nilai rata-rata tiap perspektif dengan bobot masing-masing perspektif. Dalam penelitian ini bobot masing-masing perspektif ditetapkan sebesar 25% dihitung dari 100% dibagi 4 yaitu empat perspektif dalam *Balanced Scorecard*.

Dengan menggunakan skala *likert* pada interval 1 – 5 maka nilai kinerja akhir Ditjen Bina Marga dapat mencerminkan kategori kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.
Nilai Kinerja Akhir *Balanced Scorecard*

NILAI	KATEGORI
> 90%	Sangat Baik
80% - 90%	Baik
70% - 80%	Cukup Baik
60% - 70%	Tidak Baik
< 60%	Sangat Tidak Baik

(Sumber: Hasil Penelitian Penulis)

4.6 Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana skor/nilai/ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran/pengamatan yang ingin diukur (Agung dalam Suhernin97@yahoo.com). Uji validitas akan dilakukan dengan *metode Pearson* atau *metode Product Moment*, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner dengan skor totalnya. Adapun rumus *Pearson product moment* yaitu:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

(Sumber: Bungin: metode Penelitian Kuantitatif)

Dimana:

r = koefisien korelasi *product moment*

N = jumlah responden

$\sum x$ = jumlah skor butir (x)

Σy = jumlah skor variabel (y)

Σx^2 = jumlah skor butir kuadrat (x)

Σy^2 = jumlah skor variabel (y)

Σxy = jumlah perkalian butir (x) dan skor variabel (y)

Validitas instrumen penelitian pada tingkat kepercayaan tertentu (α) ditentukan, jika:

- $r_{hitung} > r_{tabel}$, berarti valid
- $r_{hitung} < r_{tabel}$, berarti tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1989). Metode yang digunakan pada uji reliabilitas adalah metode *alpha* (α) *cronbach* (Mutaqien, 2009), sebagai berikut:

$$\alpha = 2 \left(1 - \frac{S_1^2 - S_2^2}{S_x^2} \right)$$

Dimana,

α = tingkat reliabilitas yang dicari

S_1^2 = varian dari skor belahan pertama/ganjil

S_2^2 = varian dari skor belahan kedua/genap

S_x^2 = varian dari skor keseluruhan

Reliabilitas instrumen penelitian pada tingkat kepercayaan tertentu (α) ditentukan, jika:

- jika $\alpha > r_{tabel}$, berarti reliabel
- jika $\alpha < r_{tabel}$, berarti tidak reliabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan bantuan software SPSS versi 15.0 atas setiap hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden